

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hubungan diplomatik Indonesia dengan Jepang sudah dimulai pada bulan Januari 1958 yang ditandai dengan perjanjian damai yang mampu memberikan manfaat bagi kedua negara dimasa datang. Indonesia dan Jepang menjalin kerja sama mencakup banyak sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan. Kerja sama yang dibentuk oleh Indonesia dan Jepang ini tentunya melibatkan pemerintah dari kedua negara yang disebut dengan *Government to Government*. Kesepakatan kerja sama bilateral pertama kali antara Indonesia dan Jepang adalah Indonesian Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA).

Melihat kondisi Indonesia yang setiap tahunnya meluluskan tenaga kerja perawat, hal tersebut menjadikan Indonesia surplus akan tenaga kerja perawat. Kemudian, disisi lain Jepang yang merupakan negara dengan tingkat perekonomian yang tinggi memiliki masalah demografi yang perlu diatasi. Rendahnya angka kelahiran dan tinggi nya angka usia tua menjadikan Jepang kekurangan tenaga kerja produktif. Permasalahan tersebut menjadi motivasi bagi Indonesia dan Jepang untuk membentuk kerja sama dalam pengiriman tenaga kerja kesehatan.

IJEPA menjadi kerangka kerja sama yang efektif untuk menjalankan dinamika pengiriman tenaga kerja kesehatan Indonesia ke Jepang. Kerja sama antara Indonesia dengan Jepang ini tentu saja tidak terlepas dari keinginan negara untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan nasional negaranya masing-masing. Sejalan dengan konsep interdependensi kompleks yang digunakan pada penelitian ini, Robert Keohanne dan Joseph Nye menjelaskan tentang karakteristik interdependensi kompleks.

Kerja sama IJEPA dalam pengiriman tenaga kerja kesehatan ini menunjukkan bahwa hubungan bilateral antara Indonesia dengan Jepang terbentuk atas dasar saling ketergantungan yang strategis. Dalam konsep *multiple channels*, Indonesia memanfaatkan berbagai lembaga pemerintah dan aktor non-negara yang berfungsi untuk memfasilitasi pengiriman tenaga kerja kesehatan Indonesia ke Jepang. Selain itu, pengelolaan tenaga kerja tersebut juga dapat membantu Jepang dalam tantangan kebutuhan akan tenaga kerja kesehatan yang diakibatkan oleh krisis demografi. Selanjutnya pada konsep *absense of hierarchy among issues*, kerja sama ini menguntungkan bagi kedua negara baik pada aspek ekonomi, sosial dan sumber daya manusia, serta politik. Dinamika kerja sama IJEPA dalam pengiriman tenaga kesehatan ini, tentu saja sama sekali tidak menggunakan kekuatan militer sesuai dengan konsep ketiga interdependensi kompleks yaitu *minor of military force*. Kerja sama antara Indonesia dengan Jepang melalui IJEPA dalam pengiriman tenaga kerja kesehatan ini murni berdasarkan ekonomi dan sosial yang damai untuk penyelesaian masalah dan kepentingan nasional.

Dengan demikian, alasan mengapa Indonesia menjalin kerja sama dengan Jepang melalui IJEPa dalam pengiriman tenaga kerja kesehatan adalah karena adanya hubungan saling ketergantungan antara Indonesia dengan Jepang. Indonesia dengan kondisi surplus tenaga kerja membutuhkan jalan keluar untuk mengurangi angka pengangguran dan mengatasi sempitnya lapangan kerja yang pada akhirnya Indonesia memutuskan untuk mengirimkan tenaga kerja kesehatannya yaitu perawat dan *careworker* ke luar negeri dengan catatan harus mengikuti dan lulus rangkaian seleksi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Jepang. Selain itu, kondisi Jepang yang membutuhkan tenaga kerja kesehatan karena rendahnya angka pertumbuhan dan tingginya angka usia tua, menjadikan Jepang membutuhkan tenaga kerja asing untuk memenuhi kurangnya tenaga kerja di Jepang. Karena kondisi dari masing-masing negara tersebut akhirnya Indonesia dan Jepang memutuskan untuk membangun kerja sama dengan konteks bebas hambatan yang disebut dengan IJEPa. Kemudian, kondisi saling ketergantungan ini melibatkan banyak pihak yang berperan sebagai pengatur kerja sama IJEPa agar berjalan secara sistematis.

Indonesia dalam mengirimkan tenaga kerja kesehatan melalui kerja sama IJEPa dapat disimpulkan tidak hanya bersifat pragmatis untuk memenuhi kebutuhan domestik saja, namun juga merupakan strategi diplomasi yang memanfaatkan interdependensi kompleks antara Indonesia dengan Jepang untuk menciptakan hubungan bilateral yang berkelanjutan dan multidimensional. Selain itu, kerja sama ini

juga bermanfaat sebagai *branding* Indonesia sebagai negara berkembang yang juga mampu mengirimkan SDM unggul dan profesional di pasar tenaga kerja global.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah peneliti lakukan, mengkaji kerja sama antara Indonesia dengan Jepang melalui IJEPA tentu tidak lepas dari hubungan saling ketergantungan kedua negara. Meskipun pada dasarnya IJEPA merupakan kerja sama ekonomi, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa Indonesia dan Jepang setuju untuk meluaskan sayap kerja sama nya pada bidang lain salah satunya pengiriman tenaga kerja kesehatan yaitu perawat dan *careworker* Indonesia ke Jepang. Kondisi kedua negara yang bisa dibilang saling membutuhkan menjadikan kedua negara ini saling ketergantungan dan membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan nasional masing-masing negara.

Dinamika kerja sama Indonesia dan Jepang dalam kerangka IJEPA ini masih akan terus berlanjut sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa akan terus ada pembahasan mengenai kerja sama antara Indonesia dengan Jepang yang tidak hanya terpaku pada satu isu saja namun banyak isu lainnya. Maka dari itu untuk penelitian selanjutnya, peneliti memberikan saran kepada peneliti selanjutnya untuk dapat memperluas isu dalam penelitian dengan menganalisis lebih dalam lagi mengenai dampak kerja sama Indonesia dengan Jepang melalui IJEPA terhadap pengiriman tenaga kerja kesehatan baik melalui fokus

ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Selain itu, bagi peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat mengevaluasi efektivitas program pelatihan, perlindungan tenaga kerja, dan membahas perbedaan kerja sama IJEPA ini dengan negara lain sebagai pembandingan. Melalui pendekatan multidisipliner, diharapkan peneliti berikutnya mampu memberikan gambaran dan penjelasan yang lebih kompleks dalam menganalisis kerja sama serupa, sehingga dapat menghasilkan tulisan yang lebih detail dan kualitas yang lebih baik secara akademis maupun praktis bagi pihak-pihak atau lembaga-lembaga yang berwenang dalam membentuk kebijakan luar negeri dan memenuhi kepentingan nasional.

